

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Upah Minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 upah minimum dapat ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun subsektoral, meskipun saat ini baru upah minimum regional yang dimiliki oleh setiap daerah.

Pemasalahan dasar yang berkaitan dengan upah sama di setiap negara, akan tetapi cara penanggulangannya dan peraturannya berbeda antar negara. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada

upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008:30).

Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah:

1. Menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu.
2. Meningkatkan produktivitas pekerja.
3. Mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsono, 2003)

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurahi tingkat laba yang dihasilkan, sehingga pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum. Oleh karena itu, laba perusahaan dapat ditingkatkan. Masih sedikit pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan, dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Di pihak lain, karyawan atau pekerja menganggap upah sebagai balas jasa terhadap apa yang telah ia kerjakan, sehingga pekerja akan menuntut upah lebih untuk mencukupi kebutuhannya agar mereka dapat

hidup sejahtera, tetapi dalam kenyataannya, hanya sedikit pengusaha yang secara sadar dan sukarela untuk meningkatkan taraf hidup karyawan, terutama pekerja golongan paling bawah.

Upaya untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha, dan pekerja, pemerintah perlu mengatur masalah pengupahan ini yang biasa dikenal dengan upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah.

Tingkat upah minimum ditentukan oleh empat pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja, dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.

Di Indonesia, masing-masing Propinsi menetapkan upah minimum yang berbeda-beda. Namun dalam penentuannya, masih ada Propinsi yang menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) di bawah nilai rata-rata UMP

Nasional, khususnya di Pulau Jawa. Hampir semua Propinsi di Pulau Jawa menetapkan UMP di bawah rata-rata UMP Nasional, kecuali DKI Jakarta.

Table 1.1
Upah Minimum Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2012-2016

Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	1.529.150	2.200.000	2.441.00	2.700.000	3.133.000
Banten	1.042.000	1.170.000	1.324.000	1.600.000	1.784.000
Jawa Barat	780.000	850.000	910.000	1.887.619	2.250.000
DI Yogyakarta	892.660	947.114	1.173.000	1.302.000	1.452.000
Jawa Tengah	765.000	830.000	1.000.000	1.300.000	1.480.000
Jawa Timur	745.000	866.200	1.000.000	1.250.000	1.360.000

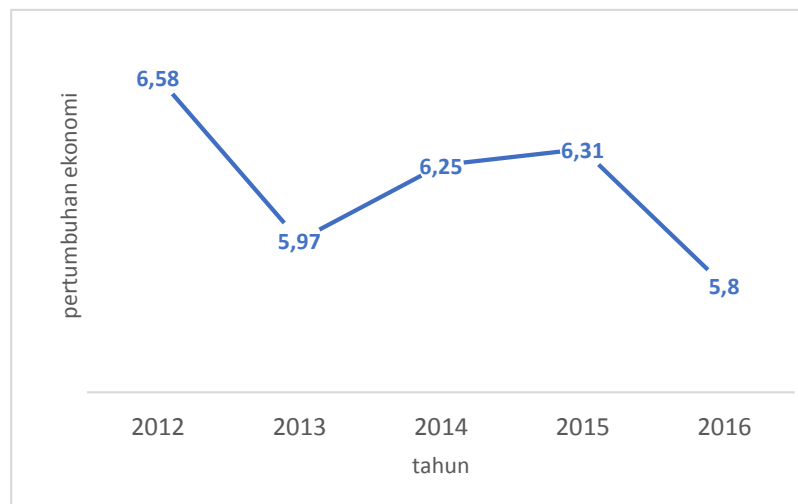
Sumber : Statistik Indonesia Tahun 2012 dan katalog BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Berdasarkan Table A.1 diatas menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi yang terletak di Pulau Jawa mengalami kenaikan dari tahun 2012-2016. Provinsi yang mempunyai upah minimum tertinggi dari tahun 2012 sampai tahun 2016 yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3.133.000, kemudian tertinggi kedua adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp 2.250.00, sedangkan upah minimum terendah pada tahun 2012 sampai tahun 2016 adalah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun masing-masing daerah memiliki tingkatan nominal upah yang berbeda-beda. Ketentuan ketentuan kenaikan rata-rata UMP tersebut tidak dapat disamaratakan karena bergantung dari sejumlah indikator, yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup

pekerja dan kemampuan perusahaan di daerah masing-masing. Upah Minimum Regional Provinsi Jawa Tengah tergolong layak dikarenakan Pemerintah selalu Mengacu pada indikator yang dilihat dari KHL (Kebutuhan Hidup Layak).

Grafik. 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 2012-2016 (Dalam Persen)



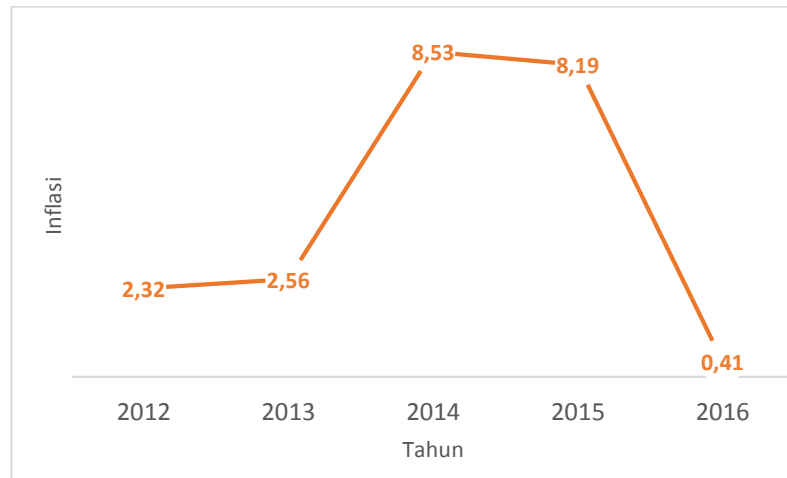
Sumber : *BPS Provinsi Jawa Tengah 2012-2016*

Berdasarkan grafik A.1 menunjukkan bahwa laju Pertumbuhan Ekonomi dari Tahun 2012-2016 berfluktuatif. Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2012 ke tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 6,6% menjadi 5,59% ditahun tersebut adalah penurunan tertinggi pertama, dan pada tahun 2013 ke tahun 2014 Pertumbuhan Ekonomi mengalami kenaikan yaitu dari angka 5,97% menjadi 6,25% , kemudian pada tahun 2014 sampai 2015 Pertumbuhan Ekonomi relatif stabil yaitu dari angka 6,25% menuju angka 6,31% kemudian pada tahun 2016 kembali mengalami penurunan menjadi 5,80.

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi dari peningkatan Upah Minimum di daerah. Apabila UMR meningkat maka secara tidak langsung akan membuat kenaikan harga-harga di pasaran. Diasumsikan bahwa ketika seorang memperoleh upah yang lebih besar maka seorang tersebut akan menggunakan upahnya untuk membeli kebutuhan secara berlebih, sehingga ketika UMR naik maka inflasi juga akan lebih tinggi. Faktor tingkat upah dan inflasi dimasukkan kedalam penelitian ini karena secara teoritis permintaan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh tingkat upah dan tingkat inflasi.

Kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang tinggi dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam *output* dan kesempatan kerja. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada pengangguran. Bila tingkat inflasi tinggi, dapat menyebabkan angka pengangguran tinggi, ini berarti perkembangan kesempatan kerja menjadi semakin mengecil atau dengan kata lain jumlah tenaga kerja yang diserap juga akan kecil. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 cukup *berfluktuatif*, kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik. 1.2
Laju Inflasi Jawa Tengah Tahun 2012-2016



Sumber : *Laju Inflasi Jawa Tengah, BPS 2012-2016*

Berdasarkan grafik A.2 menunjukkan bahwa laju inflasi di Jawa Tengah dari tahun 2012-2016 berfluktuatif. Inflasi dari tahun 2012 ke tahun 2013 cenderung stabil dari angka 2,32% ke angka 2,56%. Laju inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2013 ke tahun 2014 yaitu sebesar 8,53%. Kemudian pada tahun selanjutnya Inflasi cenderung stabil yaitu pada tahun 2014 ke Tahun 2015 hanya menurun di angka 8,19%. Namun pada tahun 2016 inflasi mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 0,41%.

Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi inflasi tetap berada di kisaran sarannya antara lain terkait dengan prospek harga komoditas global yang masih akan rendah, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta prospek peningkatan produksi bahan pangan. Selain itu, risiko tekanan inflasi juga bersumber dari kenaikan UMP yang signifikan.

Menurut Sony Sumarsono (2002:141) Upah Minimum merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektor regional, maupun sub sektoral. Dalam hal ini upah minimum adalah upah pokok dan tunjangan. Sedangkan Upah Pokok Minimum adalah upah pokok yang diatur secara minimal baik regional, sektoral, maupun sub sektoral. Dalam Peraturan Pemerintah yang diatur secara jelas hanya upah pokoknya saja tidak termasuk tunjangan. Sementara itu menurut Case & Fair (2005:533) yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah paling rendah yang diizinkan untuk dibayar oleh perusahaan kepada para pekerjanya.

Dengan melihat apa yang telah dikembangkan diatas maka skripsi ini akan menganalisis tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendapatan Perkapita terhadap Upah Minimum Regional pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. Alat analisis di dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dimana dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendapatan perkapita terhadap variable dependen yaitu Upah Minimum Regional pada tahun 2012-2016, dengan modifikasi model sebagai berikut :

$$\text{LnUMRit} = \beta_0 + \beta_1\text{PEit} + \beta_2\text{INFit} + \text{Ln}\beta_3\text{PDRBKit} + \epsilon_{it}$$

Dimana:

Ln : Logaritma natural

UMR : Upah minimum propinsi pada periode t (Rupiah)

β_0	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi
PE	: Pertumbuhan Ekonomi pada periode t (Persen)
INF	: INFLASI pada periode t (Persen)
PDRBK	: Pendapatan per kapita periode t (rupiah)
i	: <i>cross section</i> (data panel)
t	: <i>time series</i>
ε	: <i>error term</i> pada periode t

Dari apa yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas maka penelitian ini akan menganalisis Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pendapatan per kapita terhadap upah minimum regional di kabupaten/kota provinsi jawa tengah tahun 2012-2016.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang timbul di atas maka kajian ini ditujukan untuk mengetahui :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Upah Minimum di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap peningkatan upah minimum regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap peningkatan upah minimum regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap peningkatan upah minimum regional di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Bagi pembaca, dapat dipergunakan sebagai pemikiran atau bahan informasi dalam melakukan penelitian tentang upah minimum.
2. Bagi Akademik, sebagai informasi dan bahan kajian untuk perbandingan bagi peneliti lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu kombinasi dari deret waktu (*time series*) dan silang tempat (*cross section*). Data *time series* adalah data satu objek yang meliputi beberapa periode waktu (bisa kuartalan, tahunan, dan seterusnya), sedangkan data

cross section adalah data yang terdiri dari beberapa atau banyak objek dalam satu periode waktu (Juanda dan Junaidi, 2012), Dengan modifikasi model sebagai berikut :

$$\text{LnUMR}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PE}_{it} + \beta_2 \text{INF}_{it} + \text{Ln}\beta_3 \text{PDRBK}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Ln : Logaritma natural

UMR : Upah minimum propinsi pada periode t (Rupiah)

β_0 : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: koefisien regresi

PE : Pertumbuhan Ekonomi pada periode t (Persen)

INF : INFLASI pada periode t (Persen)

PDRBK : Pendapatan per kapita periode t (rupiah)

i : *cross section* (data panel)

t : *time series*

ε : *error term* pada periode t

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pendapatan perkapita dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data.

BAB IV Analisa Data dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Upah Minimum Regional.

BAB V Penutup

Memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**